

## PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TRANSAKSI AFILIASI TERHADAP MANAJEMEN LABA

**Ramadhani Adhitama**  
Magister Akuntansi STIESIA Surabaya

### Abstract

Earnings information of a company is often used by internal or external parties as a basis for decision making such as the distribution of bonuses to managers, assessing management performance and the basis for determining the amount of tax. Achievement of the amount of profit or corporate profits can trigger management to take deviant actions in reporting earnings information which is known as earnings management practices. This research generally aims to minimize earnings management practices by taking into account tax planning, implementing Good Corporate Governance, and conducting affiliated transactions appropriately to avoid conflicts of interest between the owner as the principal and the manager as an agent. This research is a quantitative study using a population of manufacturing companies in business groups listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014-2017, the number of samples in this study were 32 research samples using purposive sampling method. Testing the hypothesis by using multiple linear regression analysis. Based on the test results show that tax planning, managerial ownership and affiliated transactions have a positive and significant effect on earnings management practices while the board of commissioners and audit committee have a negative and significant effect on earnings management. However, based on the analysis in this study, institutional ownership did not affect earnings management.

**Keywords:** Tax planning, Good Corporate Governance, Affiliated Transactions, Earnings Management

### PENDAHULUAN

Kinerja perusahaan dikatakan baik apabila laba perusahaan juga baik, itulah adalah suatu ukuran paling sederhana dalam menilai kinerja perusahaan. Laba perusahaan yang diketahui publik mempunyai peran informasi yang sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Informasi laba suatu perusahaan sering digunakan oleh pihak internal atau eksternal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seperti pembagian bonus kepada manajer, menilai kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Informasi tentang laba tersebut akan menjadi perhatian bagi para investor, kreditor dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Ditjen Pajak.

Ketepatan manajemen mempunyai peran yang penting dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan untuk dapat menjamin keberlangsungan jalannya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan besarnya keuntungan suatu perusahaan. Pencapaian besarnya laba atau keuntungan perusahaan dapat memicu manajemen untuk melakukan tindakan menyimpang dalam melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen labamerupakan masalah agensi yang sering terjadi di lingkungan bisnis. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen berawal dari konflik keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. *Principal* berkepentingan memperoleh *profitabilitas* yang selalu meningkat sehingga dapat tercapai tingkat pengembalian saham yang maksimal. Agen berkepentingan memperoleh kompensasi kontrak yang maksimal agar tercapai kemakmurannya. Menurut Kusumawati dan Sasongko (2005), mengatakan bahwa dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan baik pihak eksternal dan pihak internal sebagai pengguna laporan keuangan, sehingga dapat memicu perselisihan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan.

Menurut Adhitama dan Purwaningsih(2014), menyatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* adalah tindakan dalam upaya meminimalkan beban pajak secara *eufimisme*. Pada akhirnya berdampak pada upaya manajemen untuk membuat beban

pajak seminimal mungkin, pihak manajemen cenderung untuk memperkecil pembayaran pajak. perencanaan pajak umumnya merupakan proses merekayasa peredaran usaha dan beban wajib pajak supaya pajak yang terutang berada dalam jumlah yang kecil, namun masih tetap dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) yang dijalankan oleh perusahaan merupakan tindakan yang legal selama tidak menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Konsep *good corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan secara efektif dapat meningkatkan output kualitas laporan keuangan dan dapat menekan kegiatan manajemen laba. *Good corporate governance* (GCG) yang diterapkan dapat memotivasi perilaku manajemen dengan positif untuk meningkatkan keberlangsungan perusahaan. Prinsip GCG tersebut memiliki paradigma baru yang terdiri dari empat komponen utama dalam meningkatkan profesionalisme dan profitabilitas pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*. Empat komponen utama GCG tersebut adalah *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

Penerapan *Good Corporate Governance* akan sangat berkaitan dengan kualitas hasil audit. Kegiatan audit eksternal dapat melakukan pemeriksaan keuangan dalam mendeteksi tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Kualitas audit yang dilakukan dapat meminimalisir asimetri informasi antara pihak manajemen dan *stakeholders* dengan membuka ruang kepada pihak diluar perusahaan untuk mengawasi dan melakukan validasi atas laporan keuangan. Penerapan GCG yang tepat dapat memberikan proteksi bagi *stakeholder* maupun *shareholder*, pengembalian atau *return* atas investasinya dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan GCG yaitu Ujijantho dan Pramuka (2007), Setiawan (2009), Hidayanti dan Widjayanti (2014), mengungkapkan bahwa konsep *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, penerapan konsep GCG menjadi suatu paradigma bagi dunia pasar modal dan dunia usaha, bahwa penerapan konsep GCG dengan empat pilar tersebut ternyata diindikasikan dapat menghambat aktivitas manajemen laba.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar memiliki kelompok afiliasi, hal ini memberikan peluang untuk terjadinya tindakan manajemen laba. Pada perusahaan yang berafiliasi dalam group bisnis, konflik keagenan tidak hanya muncul antara manajemen dan pemegang saham saja, tetapi berkembang menjadi konflik pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Konflik tersebut akan menjadi tajam ketika perusahaan berbentuk group bisnis, hal ini karena pemegang saham pengendali mempunyai hak kontrol penuh dan *discretionary power* yang besar dalam melakukan ekspropriasi untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri (Bae dan Jung, 2007). Tindakan ekspropriasi yang berusaha disembunyikan oleh manajemen yaitu dengan melakukan tindakan manajemen laba (Yeh dan Woidtke, 2005).

Akuisisi asset merupakan klasifikasi tindakan transaksi afiliasi yang dapat berupa pembayaran kas, penerimaan kas, penjualan asset, pertukaran aset, perdagangan barang dan/atau jasa serta transaksi lainnya kepada perusahaan yang berafiliasi (Cheung *et al.*, 2006). Menurut Gordon *et al.* (2004), menyatakan bahwa akibat adanya transaksi afiliasi perusahaan pada grup bisnis mengakibatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara manajemen dengan pemegang saham. Sedangkan menurut Cheung *et al.* (2006), mengemukakan bahwa transaksi afiliasi dapat menyebabkan terjadinya praktik ekspropriasi antara pemegang saham minoritas serta dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Tingkatan suatu transaksi afiliasi yang dilakukan pada suatu perusahaan disebut sebagai intensitas transaksi afiliasi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi intensitas transaksi afiliasi membuktikan tingginya tingkat transaksi afiliasi yang dapat bersifat *conflicts of interest* dan atau *efficient transactions*. Ukuran yang digunakan untuk mengukur

intensitas suatu transaksi afiliasi yaitu dilihat berdasarkan rata-rataskala relatif dibagi frekuensi transaksi afiliasi (Zhu, 2009). Pada penelitian ini nilai suatu intensitas transaksi afiliasi dapat dihitung dengan melihat skalarelatif yaitu transaksi afiliasi setiap pengamatan dibagi total asset. Menurut Gordon *et al.*, (2004), menyatakan bahwa jika intensitas suatu transaksi afiliasi menjadi *conflict of interest* maka akan terjadi ekspropriasi pemegang saham minoritas dan sebaliknya jika bersifat *efficient transactions* maka terjadi peningkatan nilai perusahaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perilaku manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan manajemen laba selalu diasumsikan dengan perilaku yang negatif, karena tindakan manajemen laba dapat menyebabkan informasi keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dimana informasi laba menjadi perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen perusahaan. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang dan salah satu bentuknya adalah *earnings management* (Widyaningdyah, 2001).

Tujuan dari adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh perencanaan pajak, *good corporate governance* (GCG), intensitas transaksi afiliasi terhadap manajemen laba pada perusahaan dalam grup bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pendekatan teori agensi (*agency theory*) yang melatar belakangi mengenai konsep manajemen laba. Menurut Suriana (2013), mengemukakan bahwa sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*) merupakan bagian dari hubungan keagenan. Pemisahan antara pihak *principal* dan *agent* yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan adalah pandangan dari teori agensi. Maksud investor dalam teori keagenan adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan manajemen adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya (Sanjaya, 2004 dan Sulistyanto, 2004 dalam Haryono, 2005).

Biaya keagenan (*agency cost*) akan terjadi bila ada konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan cara melakukan mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara investor dengan manajemen tersebut, yaitu pemegang saham melakukan usaha agar pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaan tidak terlalu banyak menahan kas, karena hal tersebut dapat mengakibatkan manajemen dapat menikmati kas tersebut bagi kepentingan diri sendiri. Konflik kepentingan yang terjadi memungkinkan bahwa agen tidak akan selalu bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan *principal* akan memicu terjadinya biaya keagenan. Dengan timbulnya biaya dari biaya keagenan tersebut berupa biaya pengawasan untuk memantau tindakan manajemen, biaya *bonding* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengatur struktur organisasi demi meminimalisir perilaku manajer yang tidak dikehendaki dan adanya biaya kesempatan untuk memperoleh laba dari resiko yang terjadi.

### Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif adalah teori yang meperkirakan atau memprediksi dengan baik adanya kejadian pada dunia nyata. Scott (2009) berpendapat bahwa tindakan memprediksi pengambilan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana tanggapan manajemen terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan disebut juga sebagai

teori akuntansi positif. Sedangkan menurut Aditama dan Purwaningsih (2014), menyatakan bahwa suatu tindakan yang berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa disebut sebagai teori akuntansi positif. Maksud teori tersebut adalah untuk menjelaskan dan memperkirakan konsekuensi yang terjadi atas pilihan tertentu manajemen. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif tersebut berdasarkan hubungan keagenan antara manajemen dengan pihak lain seperti investor, pengelola pasar modal, kreditor, auditor, dan institusi pemerintah. Aditama dan Purwaningsih (2014), mengatakan bahwa teori akuntansi positif dengan fenomena perilaku *oportunistik* manajer dengan membentuk tiga hipotesis yang melatarbelakangi perilaku *oportunistik* manajer tersebut, meliputi Manajer perusahaan yang berusaha untuk tidak menyepakati perjanjian kredit akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba disebut juga sebagai *Debt Covenant Hypothesis*, sehingga reputasi mereka dapat terjaga dalam pandangan pihak eksternal. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi disebut juga sebagai *Bonus Plan Hypothesis*. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Perusahaan seringkali berhadapan dengan biaya politik, yang cenderung merekayasa laba dengan menurunkan laba untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung disebut juga sebagai *The Political Cost Hypothesis*. Biaya politik termasuk semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan yang terkait sehubungan dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, aturan perpajakan, tuntutan tenaga kerja dan lainnya.

### **Manajemen Laba (*Earning Management*)**

Manajemen laba (*earnings management*) sebagai suatu kemampuan untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk mencapai tingkat laba dengan menggunakan metode akuntansi yang diharapkan oleh manajemen dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) demi keuntungannya. Salah satu ukuran kinerja yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Informasi tentang laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan juga berperan penting bagi pihak yang menggunakan karena memiliki nilai prediktif sebagaimana dinyatakan dalam *Statement Of Financial Accounting Concept (SFAC)* nomor 2. Tindakan tersebut yang memicu pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan terlihat baik oleh pihak eksternal.

Manajemen dapat melakukan intervensi langsung dalam proses pengungkapan pelaporan keuangan melalui pengungkapan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi disebut juga sebagai tindakan manajemen laba. Beberapa peneliti menyatakan bahwa tindakan manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang, Schipper (1998) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007). Rosenzweig dan Fischer, 1994 dalam Sulistyanto, (2008).

Pemilihan metode akuntansi yang tepat harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kecermatan oleh manajer, seorang manajer harus memiliki strategi yang tepat agar tindakan manajemen laba yang dilakukan tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Menurut Scott (2009), beberapa bentuk tindakan manajemen laba meliputi:

a) Manajer melakukan tindakan menggeser atau mengalihkan biaya akrual *discretionary* periode mendatang ke periode saat ini atau menggeser pendapatan akrual *discretionary* periode saat ini ke periode yang akan datang disebut sebagai tindakan *taking a bath*. Tindakan itu dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi atau bonus yang

akan diterimanya pada tahun berikutnya karena menghadapi kenyataan bahwa bonus tahun ini tidak dapat diterima.

b) Tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba, yaitu dengan langkah memindahkan atau mengalihkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah, tindakan tersebut disebut tindakan *income smoothing* (perataan laba).

c) Melakukan pertimbangan pajak dengan meminimumkan kewajiban pajak perusahaan disebut juga dengan *income minimization* (minimisasi laba).

d) Tindakan untuk memaksimalkan bonus manajer, dengan menciptakan kinerja perusahaan yang sangat baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pertimbangan pasar modal, menunda pembayaran hutang, dan manajer dapat mengendalikan penuh perusahaan disebut juga sebagai tindakan *income maximization* (maksimalisasi laba).

Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan membentuk suatu hipotesis oleh peneliti, pengukuran tersebut dapat muncul dan menguji adanya kemungkinan tersebut dengan penggunaan metode yang tepat, Sulistyanto (2008). Terdapat tiga pendekatan dalam mendeteksi manajemen laba yaitu model pendekatan berbasis *aggregate accrual*, model pendekatan berbasis *specific accruals* dan model pendekatan yang berbasis *distribution of earnings after management*.

Pendekatan dari ketiga model di atas, hanya model *aggregate accrual* yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai model yang memberikan hasil paling tepat dalam mendeteksi manajemen laba. Karena model berbasis *aggregate accrual* disebut juga sebagai model empiris ini seiring dan sejalan dengan metode akuntansi berbasis akrual, *aggregate accrual* juga acapkali diaplikasikan oleh dunia usaha dan model ini menggunakan semua variabel laporan keuangan untuk mendeteksi perekrasan dalam laporan keuangan.

Model empiris dengan berbasis *aggregate accrual* dapat mendeteksi manajemen laba yaitu meliputi:

a) Model yang mendeteksi tindakan manajemen laba dengan cara menghitung total akrual dengan cara mengurangi laba yang diperoleh selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode yang tersebut, model ini disebut sebagai model Healy (1985), yaitu rata-rata total akrual dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya. Model Healy mempunyai kekurangan yang dikemukakan oleh Dechow, *et al* (1995) yaitu bahwa total akrual yang digunakan sebagai *proxy* dalam manajemen laba mengandung *nondiscretionary accruals*. Padahal *nondiscretionary accruals* merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola atau diatur oleh manajer seperti halnya komponen *discretionary accruals*.

b) Model yang mengukur suatu manajemen laba dengan *nondiscretionary accrual*, dengan cara menghitung total akrual pada akhir periode yang dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya disebut sebagai model DeAngelo (1986). Bilamana *nondiscretionary accrual* selalu tetap setiap saat dan *discretionary accruals* mempunyai nilai rata-rata sama dengan nol selama periode estimasi, sehingga kedua model tersebut mengukur *discretionary accrual* dengan benar. Namun, apabila *nondiscretionary accrual* berubah dari periode ke periode, maka kedua model ini akan salah dalam mengukur *discretionary accrual*.

c) Model diasumsikan bahwa *nondiscretionary accrual* adalah konstan. Akan tetapi, model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan yaitu akrual periode berjalan (*current accruals*) dan *gross property, plant, and equipment* disebut sebagai model Jones (1991). Model Jones ini memberikan asumsi bahwa pendapatan merupakan *nondiscretionary*. Laba dikelola dengan menggunakan pendapatan *discretionary accrual*, maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi *discretionary accrual*.

d) Model Jones yang dimodifikasi dirancang untuk mengeliminasi kecenderungan penggunaan perkiraan yang dapat salah dari model Jones dalam menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi dari pendapatan.

## Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Langkah awal dalam melakukan manajemen pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Cara yang tepat dalam melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap perencanaan pajak adalah dengan mengamati peraturan perpajakan yang dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak, cara umum yang dilakukan adalah dengan meminimumkan kewajiban pajak. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Sumomba (2010), mendefinisikan bahwa untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar adalah dengan melakukan manajemen pajak, namun jumlah kewajiban pajak dapat ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan laba tertentu dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen.

Perencanaan pajak menurut zain (2010), yaitu tindakan yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi perpajakan oleh wajib pajak, penekanannya kepada pengendalian dari tiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak, dengan melakukan pengendalian tersebut dapat meminimalkan jumlah pajaknya yang akan di bayarkan ke pemerintah, melalui yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan tindakan yang tidak menyalahi aturan karena masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dan bukan penggelapan pajak. Sedangkan menurut Suandy (2011), mengatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu proses pengorganisasian usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik pajak penghasilan maupun beban pajak lainnya menjadi seminimal mungkin.

Strategi perencanaan pajak atau juga yang disebut *tax planning* memiliki beberapa faktor yang telah diketahui, faktor tersebut akan diterapkan untuk meminimalisir pajak, dalam penerapannya baik secara formal maupun material. Suandy (2011), mengemukakan beberapa strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Pertama, strategi *tax saving*, yaitu merupakan strategidari wajib pajak untuk menghindari hutang pajaknya dengan cara menunda atau bahkan menahan untuk tidak membeli barang dan jasa yang memiliki pajak pertambahan nilainya. Kedua, Strategi *tax avoidance*, yaitu melakukan upaya dari wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang dilakukan wajib pajak yang masih dalam pedoman ketentuan umum peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang.

Ketiga, strategi menghindari pelanggaran peraturan perpajakan, yaitu melakukan upaya dari wajib pajak dengan memahami aturan-aturan pajak yang berlaku secara umum, perusahaan dapat menghindari pengenaan sanksi perpajakan yaitu berupa sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga atau kenaikan dan sanksi denda pidana atau kurungan. Keempat, strategi menahan pembayaran pajak, yakni upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menahan pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dengan cara melalui penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Menunda penerbitan faktur pajak keluaran dan pengkreditan faktur pajak masukan hingga batas waktu yang diperkenankan. Kelima, strategi memaksimalkan kredit pajak yang dapat dikreditkan, yaitu upaya yang dialukan oleh wajib pajak dengan memaksimalkan pengkreditan pajak penghasilan pasal 22, pembelian bbm dan impor atas barang dan/atau jasa.

Tujuan dalam melakukan perencanaan pajak, salah satunya dengan memaksimalkan laba setelah pajak, karena laba setelah pajak dapat berimbas pada pengambilan keputusan. Operasi perusahaan dilakukan untuk tujuan investasi melalui pemanfaatan peluang dan dengan analisis yang tepat dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perbedaan perlakuan atas objek pajak yang hakikatnya sama dengan pemanfaatan yang meliputi: (1) Tarif pajak yang berbeda, (2) Perlakuan objek pajak dan subyek pajak yang berbeda. (3) *Loopholes, shelters*, dan *havens*.

### **Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* mempunyai beberapa elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis perusahaan yakni merupakan suatu elemen mengenai rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para *stakeholders* yang dapat disebut juga sebagai *corporate governance*, Darmawati, et al (2004). Hal ini menunjukkan bahwa *corporate governance* juga memfasilitasi penentuan tujuan dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang sekaligus untuk memonitor kinerja perusahaan.

Dalam pembahasan tentang *corporate governance*, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang pengertian dari *corporate governance*, menurut beberapa ahli terdapat beberapa pengertian dari *corporate governance*, antara lain menurut Boediono (2005) dalam Setiawan (2009), menyatakan bahwa *corporate governance* mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer.

Menurut Lindrawati (2003), dalam forum *Corporate Governance* di Indonesia, bahwa "*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan,"

Menurut Herwidayatmo (2000), dalam *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia* mempunyai pendapat yang berbeda yaitu *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai.

Penerapan dan pelaksanaan GCG pada perusahaan adalah suatu cara untuk menjamin bahwa pihak manajemen dapat bertindak baik dan tepat bagi kepentingan *stakeholders*. Penerapan GCG juga menghendaki adanya perlindungan terhadap hak pemegang saham perusahaan, terutama pemegang saham minoritas. Adanya perlindungan tersebut merupakan bagian dari pedoman pelaksanaan GCG, yang meliputi seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham mayoritas (Kartana, 2001 dalam Wignjohartojo, 2001).

Pelaksanaan prinsip *corporate governance* diharapkan dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan perusahaan dengan menimbang dan memperhitungkan kepentingan dari pihak lainnya terutama *stakeholders*, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak lagi didominasi oleh salah satu pihak yang berkepentingan. *corporate governance* pada penerapannya diharapkan lebih mendorong ke pengelolaan yang lebih terbuka, akuntabel, demokratis karena melibatkan partisipasi beberapa pihak dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kegiatan perusahaan.

### **Mekanisme Good Corporate Governance**

Pengukuran dari kepemilikan institusional menurut Ujijantho dan Pramuka (2007) adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dimana kepemilikan institusi tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai pihak yang memonitor perusahaan yang pengukurannya dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar (Faizal, 2004).

Kepemilikan manajerial merupakan kompensasi bagi manajer perusahaan. Dengan adanya kompensasi timbul keselarasan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Menurut Tunggal dan Tunggal (2002), untuk mengurangi tingkat masalah keagenan yang terjadi pada suatu perusahaan, maka diperlukan suatu kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen.

Menurut Wignjohartojo, (2001), mengatakan bahwa sebagai bagiandari perseroan yang melakukan tugas mengawasi dan memberikan nasehat terhadap keputusan yang diambil oleh direksi serta menjalankankegiatan pengurusan perseroan. Dewan komisaris dibentuk dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi seluruh kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan masukan kepada direksi apabiladiperlukandalam pelaksanaan perusahaan.

Orang yang terlibat dalam dewan komisaris harus memiliki berkarakter yang baik dan memiliki pengalaman yang dalam menjalankan perusahaan. Menurut Tunggal dan Tunggal (2002), kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham, harus mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholders* dalam perusahaan, dewan komisaris sebagai bagian dari organisasi perseroan harus menjalankan kewajiban mereka.

Pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan menurut Nasution dan Setiawan (2007). Karena posisi dari komite audit dalam pengelolaan perusahaan sangat penting. Hal ini dikarenakan bawah komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangan masalah pengendalian.

Keanggotaan komite audit terdiri setidaknya lebih dari tigaorang termasuk ketua komite, hal ini menurut Nasution dan Setiawan (2007), berdasarkan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia, dengan nomor SE-008/BEJ/12-2001. Anggota komite audit ini bisa berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

### **Transaksi Afiliasi**

Transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam group bisnis yang akan memberikan dampak berbeda terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Adanya transaksi afiliasi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam group bisnis. Namun disisi lain, afiliasi group bisnis dapat menciptakan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas yang dapat merusak nilai perusahaan. Pemegang saham pengendali mempunyai hak kontrol penuh serta *discretionary power* yang besar dalam melakukan ekspropriasi, hak control penuh tersebut untuk memaksimalkan kemakmuran sendiri daripadamemaksimalkan nilai perusahaan.

Perusahaan akan lebih mudah melakukan kegiatan ekspropriasi pada perusahaan yang punya kelompok afiliasi dibanding dengan perusahaan yang tidak punya kelompok afiliasi. Tindakan dilakukan manajemen untuk menyembunyikan ekspropriasi tersebut salah satunya melalui transaksi dari pihak-pihak berelasi (*Related Party Transaction*) adalah cara melakakukan manajemen laba, dalam hal ini hubungan antara induk dananak perusahaan. Akibat dari transaksi tersebut dapat menyebabkan perpindahan laba dari perusahaan anak ke induk.

Menurut *International Accounting Standard 24* (IASB, 2010),transaksi afiliasi atau disebut *related party transaction* (RPT) didefinisikan sebagai: "*a transfer of resources, services, or obligations between related parties, regardless of whether a price is charged*". Transaksi afiliasi merupakan suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan, menurut PSAK 7 (IAI,2012) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengadopsi



definisi dari IASB 24. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:412/BL/2009, pengertian transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

### Penelitian Terdahulu

Paparan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui dasar-dasar dari beberapa tinjauan teori yang selanjutnya digunakan dalam mengembangkan model penelitian. Dari penelitian terdahulu juga dapat diketahui posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan para peneliti.

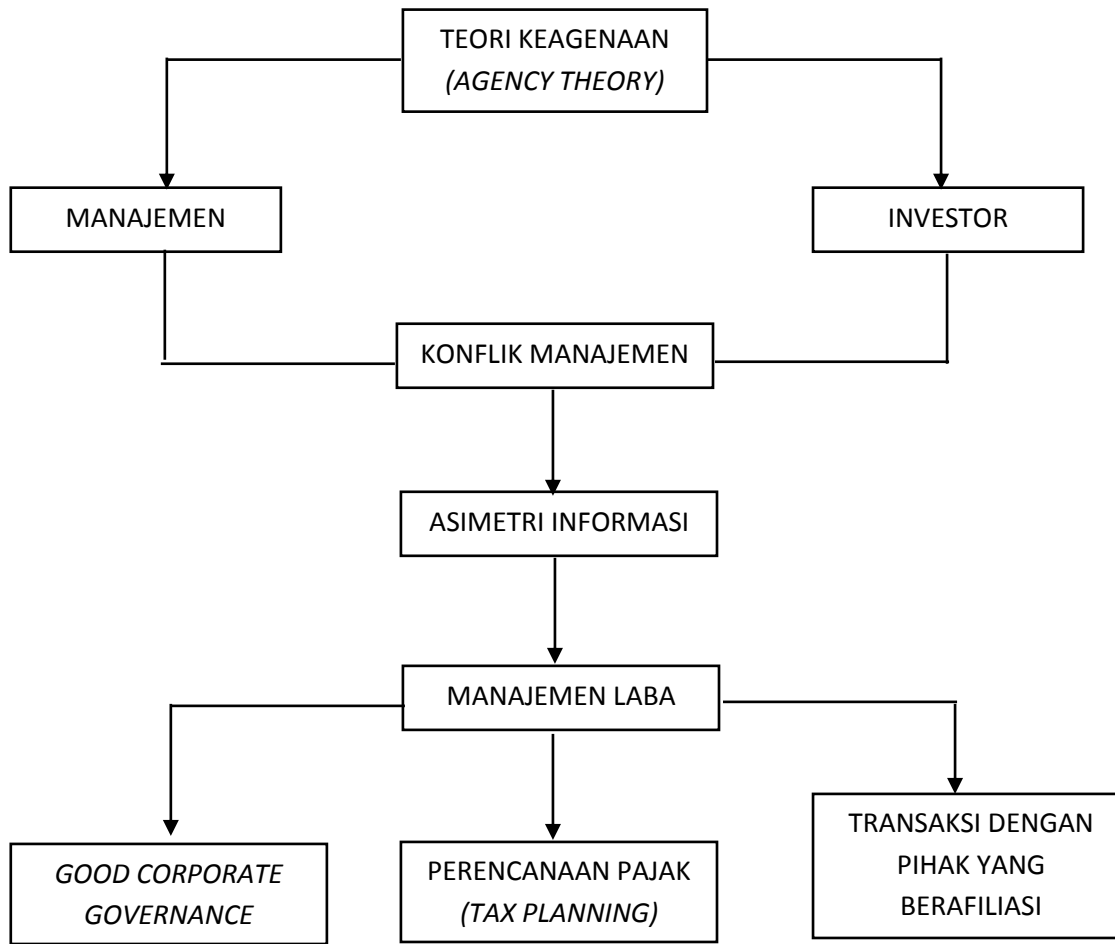
Penelitian yang terkait dengan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, yaitu Khotimah (2014), Sumomba (2010), Wijaya dan Martani (2011), Astuti dan Mildawati (2016), Santana dan Wirakusuma (2016), menyatakan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh perencanaan pajak. Sedangkan menurut Murniati, *et al*, (2014), menyatakan bahwa perencanaan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan Purwaningsih (2014), menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak oleh manajer perusahaan merupakan salah satu strategi pajak yang akan mempengaruhi manajer perusahaan untuk mengaplikasikan manajemen laba.

Penelitian yang terkait dengan pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap manajemen laba, yaitu: Setiawan (2009), Ujyantho dan Pramuka (2007), Mawardi (2011), Hidayanti dan Widjayanti, (2014), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa kualitas audit akan terkait penerapan GCG. GCG dalam penerapannya juga sangat bergantung dari hasil kualitas audit dari eksternal yang dilakukan melalui pemeriksaan keuangan perusahaan untuk menilai adanya kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Karena dengan kualitas audit yang baik akan dapat mereduksi asimetri informasi antara *stakeholders* perusahaan dan manajemen, verifikasi validitas atas laporan keuangan dari pihak di luar perusahaan dapat dimungkinkan. Penerapan GCG yang tepat dapat memberikan arahan dan *rules* yang efektif bagi *stakeholder* maupun *shareholder*, sehingga mereka dapat menjalankan dan mengelola perusahaan dengan baik.

Penelitian yang terkait transaksi afiliasi terhadap manajemen laba, yaitu: Suranta, *et al*, (2016), Suriana (2013), Tambunan, *et al*, (2016), Dewi (2014), menyatakan bahwa transaksi afiliasi grup bisnis mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan group bisnis dapat memberikan dampak berbeda terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Disatu sisi, afiliasi dalam group bisnis banyak memberikannilai tambah bagi perusahaan. Namun disisi lain, afiliasi group bisnis dapat menciptakan masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas yang dapat merusak nilai perusahaan. Pemegang saham pengendali mempunyai hak kontrol penuh dan *discretionary power* yang besar dalam melakukan ekspropriasi untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri daripada memaksimalkan nilai perusahaan. Bila hal tersebut terjadi, maka seorang manajer perusahaan berupaya semaksimal mungkin menyamarkan kegiatan ekspropriasi tersebut dengan melakukan praktik manajemen laba.

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Salah satu strategi pajak yang dalam hal ini perencanaan pajak dapat memengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Teori akuntansi positif dan teori keagenan dapat menjelaskan peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual. Dijelaskan dalam teori keagenan, manajemen sebagai pihak agent dan pemerintah sebagai pihak principal masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda dalam kebijakan pembayaran pajak. Manajemen berusaha seminimal mungkin melakukan pembayaran pajak dikarenakan dengan pembayaran pajak yang besar dapat mengurangi kemampuan dan laba perusahaan. Di sisi lain, *principal* memerlukan pembayaran yang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak demi membiayai pembangunan. Sehingga memicu adanya konflik kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, yang memicu agent untuk mengecilkan beban pajak yang dibayar kepada pemerintah.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan secara efektif, tidak hanya memperoleh keuntungan saja, namun perusahaan sebenarnya juga mendapatkan keuntungan tambahan berupa penambahan modal dari investor melalui penjualan berupa saham. Pada perusahaan yang statusnya sudah *go public* pada umumnya memiliki portofolio yang *high profile* dibanding perusahaan yang belum *gopublic*. Manajemen sangat termotivasi untuk meyajikan informasi mengenai hasil kinerja perusahaan dengan sebaik-baiknya agar nilai saham perusahaan meningkat. maka, beban pajak yang merupakan faktor pengurang laba perusahaan yang akan dibagikan kepada investor, diusahakan oleh manajemen untuk sedapat mungkin dikurangi maksimal sehingga dapat memaksimalkan laba yang akan diterima perusahaan. Seringkali, metode perencanaan pajak (*tax planning*) ini terlihat sebagai proses untuk melakukan perencanaan kegiatan usaha dan transaksi agar

meminimalkan beban pajak, namun masih dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* juga dapat diartikan sebagai merencanakan kewajiban perpajakan dengan benar, tepat waktu, dan lengkap sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. (Aditama dan Purwaningsih, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah(2014), Sumomba (2010), Wijaya dan Martani (2011), menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. sehingga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba.

Dengan demikian diketahui bahwa dengan adanya perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan adanya praktik manajemen laba, sehingga disusun hipotesis sebagai berikut

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

### **Hubungan *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ujyantho dan Pramuka, (2007), kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi, yang tidak memiliki afiliasi apapun dengan manajemen perusahaan grup bisnis. Menurut Boediono (2005), Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Proses penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Pengukuran dari kepemilikan institusional dalam penelitian ini menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan adalah dewan kepemilikan Institusional (Faizal, 2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut monitoring dan penilaian yang dilakukan oleh kepemilikan institusional dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham atau investor karena kuatnya peran pengawasan pada kepemilikan institusional. Jika kepemilikan institusional merasa tidak yakin atas kemampuan dan kinerja manajerial, maka mereka akan dengan mudah menjual kepemilikan sahamnya kembali ke pasar modal. Menurut keterangan tersebut dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

### **Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba**

Boediono (2005) menjelaskan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tingkatan kepemilikan manajerial yang lebih tinggi diharapkan pihak manajemen dapat berusaha maksimal demi kepentingan para pemegang saham.

Manajemen laba yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh tingkat tujuan motivasi manajemen. Perbedaan motivasi akan mempengaruhi besar dan kecilnya tingkat manajemen laba. hal tersebut sangat mempengaruhi manajemen laba, dikarenakan tingkat kepemilikan manajemen dapat menentukan keputusan dan kebijakan metode akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan. Suatu kepemilikan manajerial merupakan kompensasi atau bagian atas kinerja yang diterima manajer perusahaan. Melalui kompensasi ini ada kesamaan antara kepentingan manajer dan kepentingan pemilik (Tunggal dan Tunggal, 2002). Sehingga suatu kepemilikan manajerial seharusnya dapat mengurangi permasalahan

antara pemilik dan manajemen yang timbul pada suatu perusahaan, dikarenakan adanya fungsi pengawasan yang baik. Berdasarkan penjelesan diatas dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba

### **Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba**

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Karakteristik yang dimiliki dewan komisaris yaitu memiliki kaitan hubungan mengenai informasi laba, dengan peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi monitoring, pihak manajemen dapat dipengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga diperoleh laporan mengenai laba yang valid.

Dewan komisaris independen yaitu merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi atau terkoneksi dengan pihak manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak.

Pada penelitian Setiawan (2009), mengenai pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan, maka hipotesis yang bisa diajukan adalah:

H4: Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

### **Dewan Komite Audit Independen dan Manajemen Laba**

Dewan komisaris membentuk komite audit dalam melakukan tugas pengawasan pengelolaan suatu perusahaan. Peran komite audit dalam pengelolaan perusahaan sangatlah penting, komite audit dapat menjembatani hubungan antara pihak manajemen dengan pemegang saham dan dewan komisaris dalam sistem pengendalian internal. Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya mekanisme *corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Leonardo (2006) meneliti hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba dengan hasil penelitian bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Menurut beberapa penelitian terdahulu dan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

### **Hubungan Transaksi Afiliasi Terhadap Manajemen Laba**

Afiliasi group bisnis memberikan dampak yang berbeda terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Disatu sisi, transaksi afiliasi dalam group bisnis banyak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Namun disisi lain, afiliasi group bisnis dapat menciptakan masalah

keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas yang dapat merusak nilai perusahaan. Pemegang saham pengendali mempunyai hak kontrol penuh dan *discretionary power* yang besar dalam melakukan ekspropriasi untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri daripada memaksimalkan nilai perusahaan (Bae dan Jung, 2007). Dimana manajer akan berusaha sebisa mungkin menutup kegiatan ekspropriasi tersebut dengan melakukan tindakan manajemen laba.

Penelitian Suranta, *et al*, (2016), Suriana (2013), menyatakan bahwa afiliasi grup bisnis mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba, dan selanjutnya penelitian Kim dan Yi (2006) terhadap perusahaan di Korea menemukan bukti bahwa afiliasi group bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang mana besaran manajemen laba lebih tinggi untuk perusahaan yang mempunyai kelompok afiliasi dibanding dengan perusahaan yang tidak mempunyai kelompok afiliasi. Hal ini karena praktik ekspropriasi dapat dengan mudah diaplikasikan pada perusahaan yang berafiliasi dalam satu group bisnis dibandingkan dengan perusahaan tidak berafiliasi. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  
H6 : Intensitas transaksi afiliasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kuantitatif yang dianalisis dengan data sekunder. Populasi adalah keseluruhan obyek yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur dalam grup bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017. Pemilihan populasi perusahaan manufaktur dalam grup bisnis, dikarenakan bidang manufaktur hingga saat ini masih menjadi perhatian dikalangan investor lokal maupun asing, sehingga pergerakan dan pertumbuhan bidang ini masih terus dipantau dan menjadi perhatian. Disamping ini perusahaan manufaktur masih memiliki prospek masih sangat luas di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dan telah dipublikasikan untuk tahun yang berakhir dan Per 31 Desember.
2. Selama periode pengamatan perusahaan tidak di-*delisting*.
3. Perusahaan melaporkan beban pajak tangguhan antara tahun 2014-2017.
4. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian tidak melakukan merger, restrukturisasi, akuisisi dan perubahan kelompok usaha. Adanya merger, restrukturisasi, akuisisi serta perubahan kelompok usaha tersebut akan menyebabkan laporan keuangan disajikan berbeda sehingga mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan.
5. Perusahaan *go public* mempunyai kepemilikan keluarga yang telah terdaftar di bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2017.
6. Perusahaan manufaktur dalam grup bisnis yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan secara lengkap periode 2014 - 2017 dan memiliki informasi lengkap mengenai Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional.
7. Perusahaan tersebut melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi dan terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan mulai tahun 2014-2017.
8. Perusahaan grup bisnis yang mempunyai kapitalisasi pasar diatas Rp 100 triliun.

Data sekunder juga diperoleh laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang diunduh dari situs resmi Bursa efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 32 sampel.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat dua jenis variabel pada penelitian ini. Variabel yang pertama yaitu variabel independen antara lain perencanaan pajak, *Good Corporate Governance* (kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit), dan transaksi afiliasi. Sedangkan variabel yang kedua merupakan variabel dependen yaitu manajemen laba.

Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan transaksi afiliasi. Penjelasan singkat mengenai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Pajak

Variabel independen yang pertama adalah perencanaan pajak yang diukur dengan menggunakan proksi ETR. Nilai ETR memiliki esensi perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap antara kebijakan dalam perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Suranta, *et al*, (2016) menyatakan untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak atau penundaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu dengan mencari tingkat pajak efektif (*Effective Tax Rate / ETR*). Semakin rendah tarif pajak efektif maka perencanaan pajak semakin efektif. ETR dihitung sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan. Nilai ETR didapatkan dari rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}_{it}}{\text{Pretax Income}_{it}}$$

Dimana :

- a. *ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku
- b. *Tax expense*, adalah beban pajak penghasilan badan berupa beban pajak penghasilan kini dan beban pajak penghasilan tangguhan (dalam laporan laba rugi komprehensif) untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- c. *Pretax Income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan (laporan laba rugi komprehensif).

Semakin besar nilai ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

### 2. *Good Corporate Governance*

#### a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kumulatif dari presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Investor institusional disini tidak memiliki afiliasi apapun dengan manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan investor institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang *sophisticated*. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

#### b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Semakin besar kepemilikan manajer semakin kecil kecenderungan untuk

melakukan manajemen laba, karena adanya kesejajaran kepentingan dan tujuan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan Manajerial diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki, berikut rumusnya:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial}}{\text{Total Saham kepemilikan Perusahaan}} \times 100\%$$

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara legal dalam mengelola perusahaan. Peran dari dewan komisaris adalah bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Pengukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris independen suatu perusahaan. Secara sistematis Komposisi dewan Komisaris diukur berdasarkan persentase dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu:

$$DK = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

d. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan karena merupakan salah satu sistem pengendalian dalam perusahaan yang menghubungkan antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen. Komite audit ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah rapat komite audit dibagi jumlah komite audit dalam suatu perusahaan (Sekaredi, 2011). Secara sistematis dapat diformulasikan yaitu

$$KA = \frac{\text{Jumlah Rapat Komite Audit}}{\text{Jumlah Komite Audit}} \times 100\%$$

3. Transaksi Afiliasi

Transaksi afiliasi grup bisnis dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *dummy variable*, yang akan diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan transaksi afiliasi dalam grup bisnis dan 0 jika perusahaan tidak melakukan transaksi afiliasi dalam grup bisnis.

**Variabel terikat (Dependent Variable)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Model penelitian dan persamaan model regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KI + \beta_3 KM + \beta_4 DK + \beta_5 KA + \beta_6 TA + \varepsilon$$

Keterangan :

DA<sub>it</sub> = Variabel manajemen laba

a = Konstanta

β<sub>123456</sub> = Koefisien regresi

PP = Variabel perencanaan pajak

KI = Ukuran mekanisme GCG untuk kepemilikan institusional

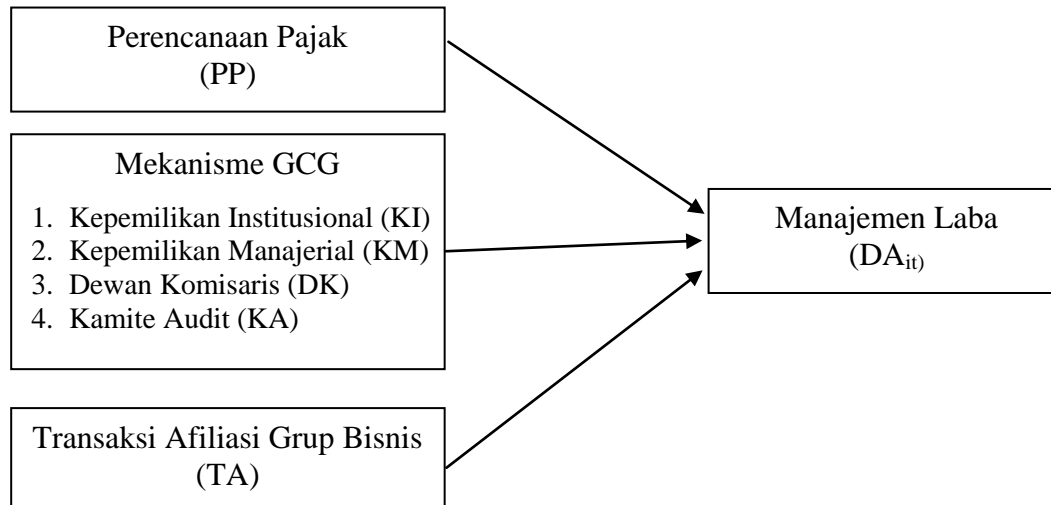
KM = Ukuran mekanisme GCG untuk kepemilikan manajerial

DK = Mekanisme GCG untuk dewan komisaris

KA = Mekanisme GCG untuk komite audit

TA = Intensitas transaksi afiliasi grup bisnis  
 $\epsilon$  = Kesalahan Pengganggu

Model penelitian dan persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:



Gambar 3.1  
Model Penelitian

### HASIL PENELITIAN

Proses seleksi sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Seleksi sampel dalam penelitian ini adalah, seperti pada tabel 4.1:

**Tabel 4.1**  
**Seleksi Sampel Penelitian Perusahaan Dalam Grup Bisnis**

NO.	KRITERIA	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Perusahaan manufaktur dalam grup bisnis yang tercatat terakhir di Bursa Efek Indonesia (BEI) per-2017 dan melakukan transaksi afiliasidan anak perusahaan	12	18	20	24
2	Perusahaan manufaktur dalam grup bisnis yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dari tahun 2014-2017	(3)	(5)	(5)	(8)
3	Perusahaan manufaktur dalam grup bisnis yang laporan keuangan yang tidak dipublikasikan dinyatakan dalam rupiah (Rp)	(2)	(3)	(3)	(2)
4	Grup bisnis yang mengalami delisting di bursa	-	(1)	-	-
5	Data yang tersedia tidak lengkap dan tidak mencantumkan mengenai kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris	(3)	(2)	(2)	(3)
		4	7	10	11
<b>Jumlah sampel penelitian</b>		<b>32 sampel</b>			

Sumber: www.idx.co.id (2017) dan www.beritasatu.com data diolah.



**Tabel 4.2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.	Skewness	Std.Err
					Deviasi		
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	or
Perencanaan Pajak	32	,18	1,36	,74	,35	,36	,94
Kepemilikan Institusi	32	,50	5,27	1,50	1,29	1,81	,94
Kepemilikan Manajerial	32	,04	,67	,28	,22	,75	,94
Dewan Komisaris	32	,12	,50	,27	,14	,65	,94
Komite Audit	32	,30	,83	,47	,12	,99	,94
Transaksi Afiliasi	32	,00	1,00	,78	,42	,63	,94
Manajemen Laba	32	11,54	71,41	19,36	8,80	1,84	,94
Valid N (listwise)	32						

Sumber: Hasil olah SPSS.

Hasil uji statistik deskriptif seperti terlihat pada tabel 4.2 diatas, menggambarkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan data sebanyak 32 sampel. Berdasarkan uji tersebut diperoleh informasi dari data yang diolah untuk masing-masing variabel penelitian dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada variabel perencanaan pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komye audit dan transaksi afiliasi selama periode penelitian menunjukkan sebaran data normal atau tidak ada penyimpangan data/*outlier*.

**Tabel 4.3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	8,92355314
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,160
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		,903
Asymp. Sig. (2-tailed)		,388

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS.

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti terlihat pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,388. Dimana nilai  $0,388 > \alpha (0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya semua variabel independen yang diteliti mempunyai data yang berdistribusi normal.

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Perencanaan pajak	0,718	1,393
Kepemilikan Institusi	0,657	1,588
Kepemilikan manajerial	0,632	1,583
Dewan komisaris	0,896	1,117
Komite audit	0,736	1,358
Transaksi afiliasi	0,847	1,181

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS.

Berdasarkan hasil uji *heterokedastisitas* seperti terlihat pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel perencanaan pajak sebesar 0,718, kepemilikan institusi sebesar 0,657, kepemilikan manajerial sebesar 0,632, dewan komisaris sebesar 0,896, komite audit sebesar 0,736 dan transaksi afiliasi sebesar 0,847, yang mana nilai *tolerance* tersebut > 0,10. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel perencanaan pajak sebesar 1,393, kepemilikan institusi sebesar 1,588, kepemilikan manajerial sebesar 1,583, dewan komisaris sebesar 1,117, komite audit sebesar 1,358 dan transaksi afiliasi sebesar 1,181, yang mana nilai VIF tersebut < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak terjadi masalah *multikolinearitas*.

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,654 <sup>a</sup>	,428	,291	9,93685	1,175

a. Predictors: (Constant), Transaksi Afiliasi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak, Komite Audit, Kepemilikan Institusi

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai *durbin-watson* (DW) sebesar 1,175, dimana nilai DW tersebut berada diantara  $\pm 2$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti tidak terjadi masalah autokorelasi antara data pengamatan.

**Tabel 4.6**  
**Uji Heterokedastisitas**

Variabel	<i>Correlation Coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Perencanaan pajak	0,345	0,153
Kepemilikan Institusi	0,130	0,479
Kepemilikan manajerial	0,180	0,323
Dewan komisaris	0,343	0,155
Komite audit	0,051	0,784
Transaksi afiliasi	0,327	0,168

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas seperti terlihat pada tabel 4.6 diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel perencanaan pajak sebesar 0,153, kepemilikan institusi sebesar 0,479, kepemilikan manajerial sebesar 0,323, dewan komisaris sebesar 0,155, komite audit sebesar 0,784 dan transaksi afiliasi

sebesar 0,168, yang mana nilai signifikan tersebut > α (0,05). Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik. Semua variabel yang diteliti tidak melanggar asumsi klasik, sehingga model yang diteliti tidak menjadi bias saat pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Model Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien regresi	T hitung	Signifikan
(constant)	30,946		
Perencanaan pajak	12,672	2,115	0,045
Kepemilikan Institusi	-1,728	-1,162	0,256
Kepemilikan manajerial	14,160	2,344	0,027
Dewan komisaris	-16,788	-2,035	0,049
Komite audit	-17,659	-2,105	0,046
Transaksi afiliasi	9,930	2,151	0,041
R	0,654		
R Square	0,428		
Adjusted R Square	0,291		
F hitung	32,120		
Signifikan F hitung	0,000		
N	32		

Sumber: diolah dari hasil SPSS

Model persamaan regresi dapat diketahui dari hasil uji model regresi tersebut, berikut model persamaan regresinya:

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 PP - \beta_2 KI + \beta_3 KM - \beta_4 DK - \beta_5 KA + \beta_6 TA + \varepsilon$$

$$= 30,946 + 12,772 PP - 1,728 KI + 14,160 KM - 16,788 DK - 17,659 KA + 9,930 TA + \varepsilon$$

Dari hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel 4.7 diatas. Menunjukkan bahwa model regresi berganda terlihat nilai signifikannya sebesar 0,000. Bila dibandingkan dengan α (5%), maka nilai signifiikan (0,000) < α (5%), ini berarti didaerah H1 diterima, yang artinya model regresi berganda adalah model yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan pajak, GCG (kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit), dan transaksi afiliasi mampu menjelaskan variabilitas variabel manajemen laba.

Berdasarkan hasil uji model, terlihat untuk model regresi berganda nilai koefisien determinasinya (R<sup>2</sup>) sebesar 0,428 atau sebesar 42,8%. Ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel manajemen laba yang mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel perencanaan pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan transaksi afiliasi sebesar 42,8%, sedangkan sisanya sebesar 57,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Setelah dilakukan analisis baik mengenai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang terkait dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Berikut pembahasan dari masing-masing hipotesis yang dikembangkan:

### 1. Perencanaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa variabel perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya perencanaan pajak diukur dengan memakai proksi ETR (*Effective Tax Rate*), yang mana menunjukkan tarif pajak efektif maka perencanaan pajak semakin efektif. Hal ini memberikan indikasi bahwa perusahaan yang semakin baik dalam melakukan suatu perencanaan pajak, maka penerapan manajemen

laba dalam perusahaan juga semakin baik. Dimana langkah awal dalam menejeman pajak yang baik adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Manajemen pajak merupakan sarana dan langkah tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang baik dan efisien, dengan menekan jumlah pajak yang terutang sekecil mungkin untuk dapat memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan. Kemudian dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*), (Ulfa, 2013).

## **2. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu meminimalkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dimana kepemilikan institusional itu menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham dan fungsi pengawasan yang lebih ketat, karena besarnya investais mereka dalam perusahaan. Apabila investor yang dalam hal ini institusional merasa kinerja manajerial kurang baik dan tidak meningkatkan nilai perusahaan, maka mereka akan dengan mudah menjual sahamnya kembali. Kepemilikan Institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faizal, 2004). Artinya kepemilikan institusional pada perusahaans semakin besar yang dimiliki oleh investor, maka semakin rendah keinginan dan motivasi manajemen dalam melakukan tindakan manajemen laba karena adanya fungsipengawasan yang lebih baik dari investor. Namun dalam penelitian ini fungsi dari kepemilikan institusional tidak bisa melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik manajemen laba.

## **3. Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial semakin tinggi, maka dapat meminimalkan tindakan praktik manajemen laba. Artinya dengan kepemilikan manajemen dengan kepemilikan signifikan, manajemen dapat melakukan pengelolaan perusahaan dengan sangat leluasa dan dapat sejalan dengan pemegang saham, sehingga manajer perusahaan juga dapat menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian kepemilikan manajerial mampu dengan mudah mempengaruhi manajemen untuk bertindak seperti pemegang saham, sehingga kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen dapat menggantikan sebagian peran dalam melakukan pengawasan yang biasanya dilakukan oleh pemegang saham. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Tunggal danTunggal (2002), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial itulebih merupakan kompensasi bagi manajer, melalui kompensasi inikepentingan manajer dan kepentingan pemilik diselaraskan.

## **4. Dewan Komisaris Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang diukur berdasarkan persentase dewan komisaris yang dimiliki perusahaan mampu mempengaruhi manajemen untuk tidak melakukan praktik manajemen laba, artinyadewan komisaris mampu melakukan monitoring terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil manajemen serta memberikan masukan kepada manajemen dalam menjalankan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wignjohartojo (2001), mengemukakan bahwa dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan supervisi tindakan dan kebijakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi apabila diperlukan.

## **5. Komite Audit Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya hasil penelitian ini membuktikan bahwa Komite Audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan, dimana fungsi dan peran komite audit sangat berpengaruh bagi perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh susunan dewan komisaris memiliki tugas melakukan monitoring dan pengawasan dalam operasional dan kebijakan perusahaan. Peran komite audit sangat penting dalam melaksanakan pengendalian internal perusahaan yang menghubungkan antara dewan komisaris, pemegang saham dan pihak manajemen. Dalam mekanisme GCG, kedudukan komite audit merupakan komponen baru bagi sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam pelaksanaannya komite audit diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara dewan komisaris, pemegang saham dan pihak manajemen dalam sistem pengendalian perusahaan.

#### **6. Transaksi Afiliasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Laba**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi afiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya hasil penelitian ini membuktikan bahwa transaksi afiliasi yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, dimana besaran manajemen laba lebih tinggi untuk perusahaan yang mempunyai kelompok afiliasi dibanding dengan perusahaan yang tidak mempunyai kelompok afiliasi atau perusahaan tunggal. Hal ini karena praktik ekspropriasi dapat dengan mudah dilakukan pada perusahaan yang memiliki afiliasi dalam satu grup bisnis dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki afiliasi atau tunggal. Ini menunjukkan transaksi pihak berelasi ini dapat menyebabkan perpindahan laba dari perusahaan anak ke induk maupun dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang berada dalam satu grup. Manajemen laba juga dilakukan oleh perusahaan grup dengan cara *offset* perusahaan anak dengan induk perusahaan. Sesuai dengan pendapat dari Bae dan Jung (2007), Pemegang saham pengendali mempunyai hak kontrol penuh dan *discretionary power* yang besar dalam melakukan ekspropriasi untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri daripada memaksimalkan nilai perusahaan. Artinya manajemen sedapat mungkin menyembunyikan tindakan ekspropriasi tersebut dengan cara melakukan manajemen laba.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Pada penelitian ini, hasil uji analisis regresi berganda pada model persamaan kinerja proyek dengan nilai koefisien determinasinya ( $R^2$ ) sebesar 42,8%. Ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel manajemen laba yang mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel perencanaan pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan transaksi afiliasi sebesar 42,8%, sedangkan sisanya sebesar 57,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan nilai koefisien determinasinya ( $R^2$ ) tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam grup bisnis memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Artinya manajemen perusahaan grup bisnis mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali perusahaan. Artinya langkah awal dalam manajemen pajak dibutuhkan suatu perencanaan pajak yang tepat dan terukur. Perencanaan pajak merupakan salah satu langkah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat sesuai dengan koridor peraturan perpajakan yang berlaku, dengan menekan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk mendapatkan likuiditas dan tingkat laba yang diinginkan.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusi tidak mampu meminimalkan adanya tindakan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Struktur kepemilikan manajemen semakin tinggi, maka dapat meminimalkan tindakan praktik manajemen laba. Artinya dengan kepemilikan manajemen dengan kepemilikan

signifikan, manajemen dapat melakukan pengelolaan perusahaan dengan sangat leluasa dan dapat sejalan dengan pemegang saham, sehingga manajer perusahaan juga dapat menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan.

Dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya dewan komisaris diukur berdasarkan persentase dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan mampu mempengaruhi manajemen untuk tidak melakukan praktik manajemen laba, artinya dewan komisaris mampu melakukan monitoring terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil manajemen serta memberikan masukan kepada manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya bahwa Komite Audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Hal sesuai dengan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan mampu menjalankan fungsi pengawasannya, dimana keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan.

Transaksi afiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menyatakan bahwa besaran manajemen laba lebih tinggi untuk perusahaan yang mempunyai kelompok afiliasi dibanding dengan perusahaan yang tidak mempunyai kelompok afiliasi atau perusahaan tunggal. Hal ini karena praktik ekspropriasi dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan yang memiliki afiliasi dalam satu grup bisnis dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki afiliasi atau tunggal. Hal ini menunjukkan transaksi pihak berelasi ini dapat menyebabkan perpindahan laba dari perusahaan anak ke induk maupun dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang berada dalam satu grup.

## **Saran**

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran dalam penelitian ini diharapkan manajemen perusahaan untuk selalu melakukan monitoring dan mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dengan cara manajemen perusahaan menerapkan perencanaan pajak, menerapkan prinsip GCG, dan mengawasi adanya transaksi afiliasi dan perlu memperhatikan dan mengevaluasi terhadap kepemilikan saham oleh institusi eksternal. Agar fungsi dari penerapan prinsip GCG lebih baik lagi, karena variabel kepemilikan institusional pada penelitian ini tidak berpengaruh pada praktik manajemen laba.

Peneliti lain disarankan agar dapat mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan praktik manajemen laba khususnya pada pengukuran manajemen laba. Dan perlunya mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam meminimalkan adanya praktik manajemen laba yang dipersepsikan dengan perencanaan pajak, mekanisme GCG, dan transaksi afiliasi. Sehingga dapat mengetahui perbedaannya dengan penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga disarankan agar dapat melakukan penelitian dengan obyek yang berbeda dan menambah jumlah variabel dalam penelitian seperti variabel profitabilitas, pertumbuhan omset, *initial public offering (IPO)*, dan lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, F. 2008. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi kelima. cetakan kedelapan. Universitas Muhammdiyah Malang Press. Malang
- Achmad, K., et al. 2007. Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Universitas Hasanuddin*: 1-28.
- Aditama, F dan Purwaningsih, A. 2014. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *MODUS Vol.26 (1)*: 33-50.
- Bae, K.H., & Jeung, S.W. 2007. The Value relevance of Earning and Book Value, Ownership Structure, and Business Group Affiliation: Evidence From Korean Business Group. *Journal of Business Finance & Accounting* 34: 740-766.
- Bodie, Z., Kane, A., dan Marcus, A.J. 2014. *Investments*. 10th ed. McGraw Hill Education. New York
- Boediono, Gideon, S.B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*: 172-194.
- Chandra Dewi. N.A. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Ekspropriasi Di Indonesia. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). 11 Mei 2017 (14.35)
- Cheung, Y.-L., Rau, P. R., dan Stouraitis, A. 2006. Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong. *Journal of Financial Economics* 82(2): 343-386.
- Darmawati, D, et al. 2004. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali*: 391-407
- Faizal. 2004. Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan, dan Mekanisme Corporate Governance. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali*: 197-207
- Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. *Corporate Governance*. Edisi ketiga. Prentice Hall. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan V. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gordon, A. E., Henry, E., dan Palia, A. 2004. Related Party Transactions and Corporate Governance. *Advances in Financial Economics* 9:1-27.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Terjemahan Mangunsong, R.C. buku 2. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia*. *Usahawan*. Tahun XXIX No 10. Oktober. Halaman 25-32.
- Hidayanti. E dan Widjayanti R.D.P. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik Manajemen Laba Riil Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Wiga* 4(2).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Standar Akuntansi Keuangan per Juni 2012*. IAI. Jakarta.
- International Accounting Standards Boards (IASB). 2010. *International financial reporting standards Part A*, A589. IFRS. London.
- Isgiyarta, 1. dan Tristiarini, N. 2005. Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate Governanace Terhadap Abnormal Return Pada Saat Pengumuman Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 12(2): 169-187.
- Khotimah. H. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba, *Esensia, Jurnal Bisnis Ekonomi* 4(2).

- Kusumawati, A.A.N. dan N. Sasongko. 2005. Analisis Perbedaan Pengaturan Laba (Earnings Management) pada Kondisi Laba dan Rugi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*4(1):1-20.
- Kim, N. B. dan Yi, C.H. 2006. Ownership Structure, Business Group Affiliation, Listing Status, and Earnings Management: Evidence from Korea. *Contemporary Accounting Research*, 23 (2): 427-464.
- Latan, H dan Temalagi.S. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. CV. ALVABETA. Bandung.
- Lindrawati. 2003. Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di BEJ. *Jurnal Ekoflomi dan Bisnis* 6(1): 19-36.
- Mawardi. M.C. 2011. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di BEI, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). 11 Mei 2017 (19.43).
- Murniati, Z, et al. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Ekoflomi dan Bisnis* 9(2).
- Mutia, Evi. et al. 2011. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 4(2): 187-201.
- Nasution, M., dan Setiawan, D. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar:1-26.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2009. *Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Keputusan Ketua Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor :KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang. OJK. Jakarta.
- Puji Astutik, R.E dan Mildawati, T. 2016, Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*5(3).
- Santana, D, K, W dan M. G. Wirakusuma. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. *E-jurnal akuntansi udayana* 13(3):1578-1579
- Scoot, W.R. 2009. *Financial Accounting Theory*. 5th Edition. Pearson Education Canada. Toronto.
- Sefiana, Eka. 2010. Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI). *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Sekaredi, S. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Setiawan, T. 2009. Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2007, *Jurnal AKUNTANSI KONTEMPORER*1(2): 99-122.
- Setiawati, L dan Ainun, N. 2002. Manajemen Laba dan IPO Di bursa efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*: 1-16.
- Stice, J. D. et al. 2006. *Intermediate Accounting*. 16<sup>th</sup> Edition. Cengage Learning. Boston.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Subramanyam, K.R. dan Wild, John J. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. buku satu. edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- Sulistyanto, S. 2008. *Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris*. Yrama Wdiya. Jakarta.
- Sumomba, C. R. 2010. Pengaruh Beban Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.



- Suranta, E, *et al.* 2016. Pengaruh Grup Bisnis Terhadap Manajemen Laba Dimoderasi Oleh Kepemilikan Saham Pengendali, Perencanaan Pajak, Dan Arus Kas Operasi, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung. Universitas Lampung.*
- Suriana. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan Dan Afiliasi Group Bisnis Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Implementasi Ekonomi Dan Bisnis*: 839-855.
- Tambunan. M.E, *et al.* 2016. Determinan Intensitas Transaksi Afiliasi pada Perusahaan-Perusahaan dalam Grup Bisnisd Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi* 15(2): 121-138.
- Trihendradi, Cornelius. 2013. *Step By Step IBM SPSS 21 : Analisis Data Statistik.* CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Tunggal, A.W dan Tunggal, I.S. 2002. Memahami Konsep Corporate Governance. Havarindo. Jakarta.
- Tunggal, A.W. 2011. *Pengantar Internal Auditing, Peranan dan Fungsi Audit Internal dalam Organisasi.* CV Elvira. Bandung.
- Ujiyantho, M.A., dan Pramuka, B.A. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.* Universitas Hasanudin:1-26.
- Ulfa, Y. 2013. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.*
- Utama, S. dan F. Leonardo Z. 2006. Audit Committee Composition, Control of Majority Shareholders and Their Impact on Audit Committee Effectiveness: Indonesia Evidence. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 9(1):21-34.
- Veronica, S dan Utama, S. 2005. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 Solo.*
- Visvanathan, G. 2008. Corporate Governance and Manajemen laba riil. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 12(1):9-10.
- Widarjono, A. 2010. Analisis Statistika Multivariat Terapan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Widyaningdyah. A.U. 2001. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap *Earnings Management* Pada Perusahaan Go Public Indonesia, *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3(2):89-101.
- Wignjohartojo, P. 2001. *Good Corporcte Governance: Implementasi Beserta Implikasi dan Masa Depan.* Majalah Ekonomi. 1 April. Halaman 64-77. Jakarta
- Wijaya, M dan Martani, D. 2011. Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.*
- Wira Santana, D.K dan Wirakusuma. M.D. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*: 1555-1583.
- Yeh, Y. H. & Woidtke, T. 2005. Commitment or entrenchment?: Controlling Shareholder and board composition. *Journal of Banking & Finance*: 29.
- Zain, M. 2010. *Manajemen Perpajakan.* cetakan kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Zhu, Z. 2009. Multiple principal-agent relationships, corporate-control mechanisms and expropriation through related party transactions: evidence from China. *International Research Journal of Finance and Economics*: 31.